Pertemuan Konsultan Masyarakat Perencanaan Teknis di Salobunne Kabupaten Soppeng

Meeting of Technical Planning Community Consultants in Salobunne, Soppeng Regency

Tambaru^{1*}, Rafli Yuniato Pratama², Nusbih Ismail³, Rio Udaya⁴, Siti Munawaroh⁵,
Delma Pratisa⁶, Afifah Masruniwati⁷

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

⁷Universitas Patempo, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Murjani II Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur.

Korespondensi penulis: siti010890@gmail.com

Article History:

Received: Februari 14, 2021

Revised: Februari 28, 2021

Accepted: Maret 17, 2025

Published: Maret 31, 2025

Keywords: Community

Consultation, Irrigation, Technical
Planning, Public Participation

Abstract: *The Community Consultation Meeting (PKM) for the Technical Planning of the Salobunne Irrigation Area (D.I Salobunne) in Soppeng Regency represents a participatory approach to the preparation of irrigation infrastructure development plans. This activity aimed to provide local communities with information about the proposed irrigation improvement plans and to collect input, suggestions, and recommendations from various stakeholders in the region. The meeting was held at the Village Hall of Tellulimpoe, Marioriawa District, and was attended by representatives from local government, technical consultants, community leaders, and farmer organizations such as P3A and GP3A. The forum served as a platform for communication between technical implementers and the community to ensure that the planning aligns with real conditions and local needs. The outcome of the meeting demonstrated positive collaboration in realizing a participatory, appropriate, and sustainable irrigation planning system.*

Abstrak

Pertemuan Konsultasi Masyarakat dalam rangka Perencanaan Teknis Daerah Irigasi (D.I) Salobunne di Kabupaten Soppeng merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan infrastruktur irigasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait rencana perbaikan sistem irigasi serta menerima masukan, saran, dan usulan dari berbagai pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Pertemuan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, pihak konsultan, tokoh masyarakat, serta lembaga petani seperti P3A dan GP3A. Forum ini menjadi wadah komunikasi antara pelaksana teknis dan masyarakat guna memastikan bahwa perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual lapangan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya sinergi positif dalam mewujudkan perencanaan sistem irigasi yang partisipatif, tepat guna, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Konsultasi Masyarakat, Irigasi, Perencanaan Teknis, Partisipasi Publik

1. LATAR BELAKANG

Irigasi merupakan komponen penting dalam menunjang pembangunan pertanian di Indonesia. Ketersediaan air irigasi yang cukup merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat produktivitas hasil pertanian. Di Indonesia, kebutuhan penggunaan air untuk irigasi paling besar dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi air lainnya. Kebutuhan air irigasi diperkirakan sekitar 80% dari total konsumsi air. Kebijakan Pengelolaan Irigasi telah dibagi

berdasarkan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015, luas potensial daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah 105.666 Ha yang terbagi atas 38 Irigasi permukaan, 2 irigasi rawa dan 27 irigasi tambak. BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa luas lahan sawah di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 649.190 Ha dan 60,19 % diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi.

Pengelolaan irigasi menjadi hal yang penting dalam mendukung produktivitas pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan. Irigasi memerlukan investasi yang besar untuk membangun sarana dan prasarannya, operasional dan pemeliharaannya, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan tepat agar penggunaan air irigasi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pengguna air irigasi. Salah satu lembaga yang sangat berperan ditingkat Masyarakat khususnya dalam pengelolaan irigasi adalah P3A/GP3A/IP3A yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di petak tersier dan berpartisipasi pada jaringan sekunder dan primer. Namun kemampuan P3A/GP3A/IP3A dianggap masih rendah dalam mendukung pengelolaan irigasi yang berkelanjutan.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

Pembangunan pertanian tidak saja diarahkan untuk mencapai peningkatan produksi dalam rangka swa sembada beras tetapi menjadi peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan. Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin ketercapaian target surplus beras tersebut pada kantong-kantong produksi pertanian tanaman pangan di daerah. Untuk itu, prasarana dan sarana irigasi harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan layanan pengairan irigasi sesuai kinerja yang diharapkan.

D.I Salobunne merupakan salah satu daerah irigasi teknis di Kabupaten Soppeng dengan luas potensial sawah 1.386 Ha. Untuk itu, segala bangunan yang ada saat ini perlu diperhatikan kondisinya supaya kapasitas dan kinerjanya tetap dapat mengakomodir kebutuhan air irigasi masyarakat sesuai dengan perencanaan awal.

Pengelolaan sumber daya air yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan hasil pertanian. Daerah Irigasi (D.I) Salobunne di Kabupaten Soppeng memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian jika didukung dengan sistem irigasi yang baik. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan teknis yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas sistem irigasi yang ada serta memastikan pemanfaatan air secara optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Irigasi merupakan sistem penyediaan dan pengaturan air bagi lahan pertanian yang berfungsi untuk menjamin kesinambungan produksi tanaman. Menurut Soemarto (1999), irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertumbuhan tanaman guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Di negara agraris seperti Indonesia, irigasi menjadi tulang punggung dalam pengembangan pertanian karena sebagian besar pertanian di Indonesia masih sangat bergantung pada sistem irigasi, terutama pada musim kemarau.

Data nasional menunjukkan bahwa sekitar 80% dari total konsumsi air digunakan untuk keperluan irigasi (Departemen PU, 2015). Hal ini menunjukkan dominasi sektor pertanian dalam konsumsi air, dan oleh karena itu pengelolaan air irigasi yang efisien sangat krusial. Efisiensi distribusi dan penggunaan air irigasi berkaitan langsung dengan keberhasilan budidaya tanaman, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada sistem irigasi teknis seperti Provinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, pengelolaan irigasi dibagi berdasarkan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, luas potensial daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi mencakup 105.666 hektar. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan irigasi yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan tingkat pemerintahan yang paling memahami kondisi lokal.

Lembaga petani seperti P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), GP3A (Gabungan P3A), dan IP3A (Induk P3A) memiliki peran penting dalam pengelolaan irigasi di tingkat tersier hingga primer. Sesuai dengan Permen PUPR No. 24/PRT/M/2008, kelembagaan petani ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fungsi sistem irigasi melalui partisipasi aktif petani dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Namun, kemampuan lembaga ini masih perlu ditingkatkan, baik dari segi manajemen, teknis, maupun kelembagaan.

Kinerja sistem irigasi sangat tergantung pada kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Infrastruktur irigasi seperti bendung, saluran primer, sekunder, dan tersier harus dijaga kelayakannya agar dapat mendistribusikan air secara merata dan sesuai kebutuhan. Daerah Irigasi (D.I) Salobunne di Kabupaten Soppeng, misalnya, memiliki luas potensial 1.386 hektar sawah, yang akan optimal produktivitasnya jika didukung oleh sistem irigasi yang memadai dan berfungsi dengan baik.

Pembangunan pertanian saat ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai swasembada pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan FAO (2002) yang menyatakan bahwa ketahanan pangan tercapai apabila masyarakat memiliki

akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Sistem irigasi yang baik akan meningkatkan indeks pertanaman (IP), mengurangi risiko gagal panen, dan memperbaiki kualitas hasil pertanian.

Perencanaan teknis yang baik diperlukan agar sistem irigasi dapat memenuhi kebutuhan air yang sesuai dengan pola tanam. Hal ini mencakup analisis kebutuhan air tanaman, kapasitas saluran, serta evaluasi kondisi bangunan irigasi. Menurut Triatmodjo (2003), perencanaan sistem irigasi harus memperhatikan aspek hidrologi, topografi, dan teknis bangunan agar air dapat dialirkan dan dimanfaatkan secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi beberapa tahapan. Pertama, dilakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi eksisting sistem irigasi yang ada. Selanjutnya, dilakukan analisis teknis untuk mengevaluasi kapasitas saluran dan kebutuhan air irigasi guna memastikan efisiensi distribusi air. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun desain perencanaan berupa rancangan perbaikan sistem irigasi yang lebih optimal. Tahap akhir melibatkan sosialisasi dan pelatihan kepada para petani dengan tujuan memberikan edukasi mengenai manajemen air yang baik dan berkelanjutan.

Survey dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting saluran irigasi, termasuk dimensi saluran, kapasitas air, dan tingkat kerusakan yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petani serta observasi langsung di lapangan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Analisis mencakup, kapasitas debit air yang tersedia, evaluasi kerusakan saluran, efisiensi distribusi air ke lahan pertanian. Dari hasil analisis, disusun rancangan teknis yang mencakup perbaikan saluran utama, pembangunan pintu air, dan peningkatan kapasitas tampungan air.

Sosialisasi dilakukan kepada kelompok tani terkait penggunaan dan pemeliharaan saluran irigasi yang lebih baik. Materi yang diberikan mencakup, teknik pemeliharaan saluran irigasi, pengelolaan air secara efisien, dan peran serta masyarakat dalam keberlanjutan irigasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM ini dilaksanakan pada periode minggu ke dua kegiatan pekerjaan dari Penyedia Jasa Konsultasi, yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2025. Lokasi PKM dilaksanakan di aula Kantor Desa Tellulimpoe Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng. Lingkup kegiatan pekerjaan, meliputi pertemuan masyarakat, penjelasan dari pejabat yang

berwenang, pemberian pendapat, usul, saran dan lain-lain, dan penandatanganan berita acara PKM.

Peserta yang hadir adalah undangan yang terdiri atas, Kepala UPTD Wil. Sungai Walanae Cenranae Prov. Sulsel, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, Camat Marioriawa, Lurah Attangsalo, Lurah Kaca, Kepala Desa Tellulimpoe, P3A/GP3A DI Salobunne Kab. Soppeng, Juru, POB dan PPA DI Salobunne Kab. Soppeng, dan Tokoh Masyarakat setempat. Lokasi pertemuan di Aula Kantor Desa Tellulimpoe Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng:

1. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Camat Marioriawa serta penjelasan umum tentang maksud dan tujuan dari Pertemuan Konsultasi Masyarakat.
2. Penjelasan dari Kepala Seksi Perencanaan SDA Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Tata Ruang Prov. Sul Sel tentang rencana kegiatan Perencanaan Teknis DI Salobunne dan diharapkan masukan-masukan dari masyarakat.
3. Penjelasan teknis oleh dari Narasumber Ir. Tambaru, ST.MT, tentang :
 - Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perencanaan Teknis DI Salobunne Kab. Soppeng .
 - Penjelasan yang telah dikerjakan dan program kerja selanjutnya.
 - Meminta pendapat usul-usul dari para hadirin tentang kegiatan Perencanaan Teknis DI Salobunne.
4. Tanya jawab dipimpin oleh Pimpinan Rapat dengan jawaban dan penjelasan dari pihak Narasumber dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Tata Ruang Prov. Sul Sel.
5. Rapat PKM ditutup jam 16.30 WITA oleh Kepala Desa Tellu Limpoe Kecamatan Mario Riawa Kab. Soppeng.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam perencanaan teknis D.I Salobunne memberikan manfaat yang signifikan dalam perbaikan sistem irigasi serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air.

Agar hasil yang telah dicapai dapat berkelanjutan, disarankan adanya:

1. Peningkatan investasi dalam perbaikan irigasi.
2. Pelatihan berkelanjutan bagi petani dan kelompok tani.
3. Penguatan regulasi dalam pengelolaan sumber daya air.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan implementasi perbaikan sistem irigasi di wilayah D.I Salobunne, Kabupaten Soppeng.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik pertanian Provinsi Sulawesi Selatan 2018*. BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2015). *Laporan tahunan sumber daya air*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- FAO. (2002). *The state of food insecurity in the world 2002*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2008). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Fasilitas Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Munawaroh, Siti. (2020). Analisis Metode Pencatatan Persediaan Air Mineral Aqua Pada Ud Kaltim Makmur Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 5(2).
- Soemarto, R. B. (1999). *Hidrologi teknik*. Jakarta: Erlangga.
- Triatmodjo, B. (2003). *Irigasi*. Yogyakarta: Beta Offset.

Dokumentasi

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3